

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

*Provinsi Maluku Utara*

## 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

*Provinsi Maluku Utara*

2017



# Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2017

ISSN : 2460-7495  
No. Publikasi : 82550.1812  
Katalog BPS : 412004.82

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : X + 86 halaman

Naskah :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar :  
BPS Provinsi Maluku Utara

Gambar Kulit :  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :  
© BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2017 merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Maluku Utara penerbitan ke-17 yang menyajikan data mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Maluku Utara antar kabupaten/kota dan tipe daerah. Data utama yang digunakan bersumber dari Proyeksi Penduduk Maluku Utara 2010-2035, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Maluku Utara Dalam Angka 2018.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, kami sampaikan penghargaan terima kasih. Kritik dan saran membangun untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Ternate, November 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku Utara



Misfaruddin

<https://malut.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
SINGKATAN DAN AKRONIM .....	vi
1. KEPENDUDUKAN.....	2
2. KESEHATAN DAN GIZI .....	13
3. PENDIDIKAN .....	16
4. KETENAGAKERJAAN.....	21
5. POLA KONSUMSI.....	27
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN .....	33
7. KEMISKINAN .....	27
8. SOSIAL LAINNYA.....	33
LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
ISTILAH TEKNIS.....	vi
SUMBER DATA.....	vi

<https://malut.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2017 .....	4
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017.....	7
Tabel 1.3 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR), 2013-2017 .....	9
Tabel 1.4 Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016-2017 .....	9
Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2016-2017 .....	11
Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB) , 2013-2017 .....	15
Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2015-2016.....	16
Tabel 2.3 Persentase Anak Usia 24-59 Bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui, 2016-2017.....	17
Tabel 2.4 Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2016-2017 .....	18
Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Persalinan Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2016-2017.....	19
Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2016-2017 .....	21
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017 .....	26
Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017	27
Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017 .....	28
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017 .....	29
Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017 .....	31
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016-2017 .....	36
Tabel 4.2 Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2017 .....	37
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2016-2017 .	39
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Status Pekerjaan, 2016-2017 .	41
Tabel 4.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2016-2017 .....	42

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2017 .....	45
Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016-2017 .....	47
Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016-2017 .....	47
Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2016-2017 .....	49
Tabel 5.5 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017 .....	50
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2017 .....	54
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016-2017 .....	55
Tabel 7.1 Perkembangan Kemiskinan, 2015-2017 .....	59
Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Berpergia Menurut Tipe Daerah, 2016-2017 .....	63
Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2016-2017 .....	64
Tabel 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Akses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Lokasi/Media, 2016-2017 .....	65
Tabel 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2016-2017 , .....	67

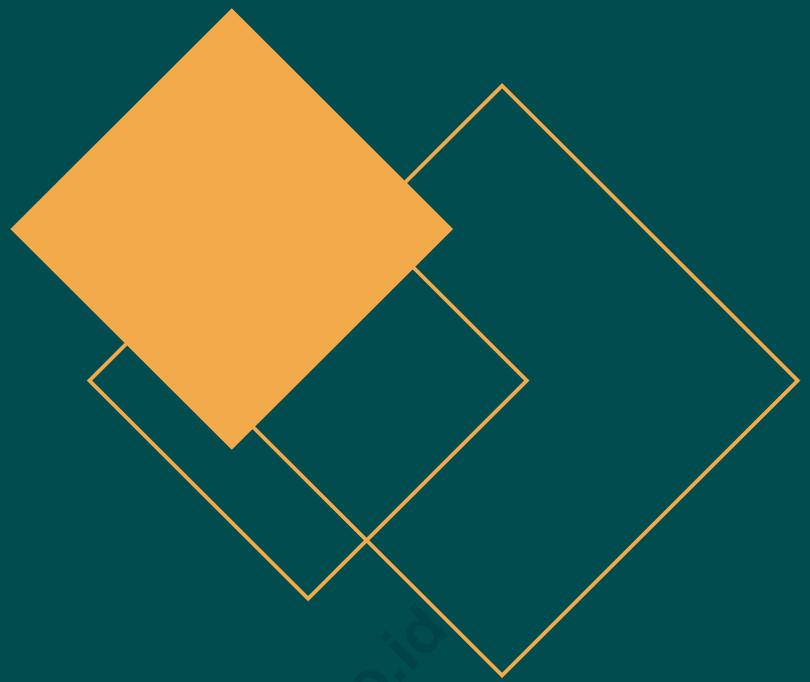
# DAFTAR GAMBAR

1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2017 .....	4
1.2 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk, 2017 .....	6
1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017.....	6
5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, tahun 2016-2017 .....	46
8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2017 .....	66
8.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial, 2017 .....	66

<https://malut.bps.go.id>

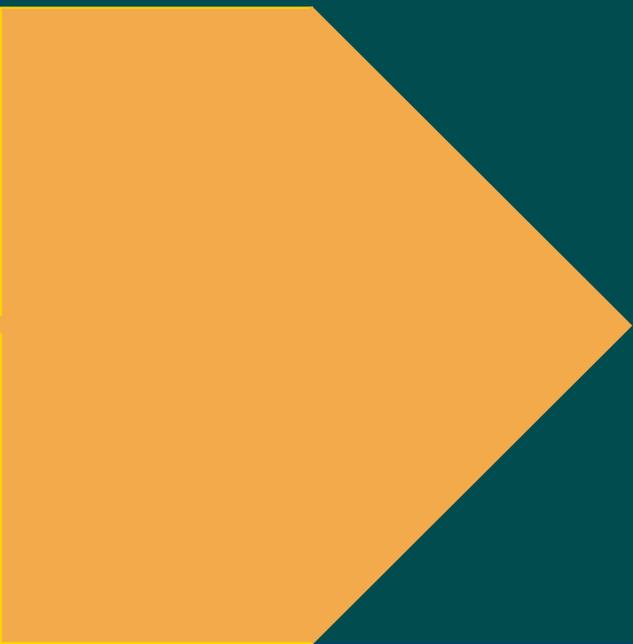
## SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ASI	: Air Susu Ibu
BPS	: Badan Pusat Statistik
D1/D2/D3	: Diploma 1/ Diploma 2 / Diploma3
K	: Perkotaan
D	: Perdesaan
K + D	: Perkotaan + Perdesaan
L	: Laki-laki
P	: Perempuan
L+P	: Laki-laki + Perempuan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
Sakernas	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SM	: Sekolah Menengah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMLB	: Sekolah Menengah Luar Biasa
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SP	: Sensus Penduduk
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Wajar	: Wajib Belajar



# KEPENDUDUKAN

<http://lut.bps.go.id>



1



Penduduk sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan otomatis menjadi modal dasar yang diperlukan demi berhasilnya kegiatan pembangunan suatu wilayah. Masalah kependudukan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi beban dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk yang berkembang pesat tanpa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk diantaranya adalah kelaparan akibat ketersediaan pangan yang tidak mencukupi, munculnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia hingga maraknya aksi kriminalitas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya mengarah dalam hal kuantitas, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul karena tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kualitas penduduk adalah bertambahnya jumlah pengangguran karena terkadang kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan tidak terpenuhi yang akan berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

### **Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk di Maluku Utara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035, jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2017 mencapai 1.209.342 jiwa atau mengalami kenaikan sekitar 23.430 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 1.185.912 jiwa. Dalam lima tahun terakhir (2013-2017) jumlah penduduk Maluku Utara mengalami penambahan penduduk sebesar 94.445 jiwa atau meningkat sekitar 8,47 persen.

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan Maluku Utara secara khusus adalah jumlah penduduk yang cukup besar. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara pada tahun 2017 tercatat sebesar 1,98 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk Maluku Utara sebesar 2,18 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,08 persen pada tahun 2015 dan 2,03 persen pada tahun 2016. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Maluku Utara telah menunjukkan adanya keberhasilan.

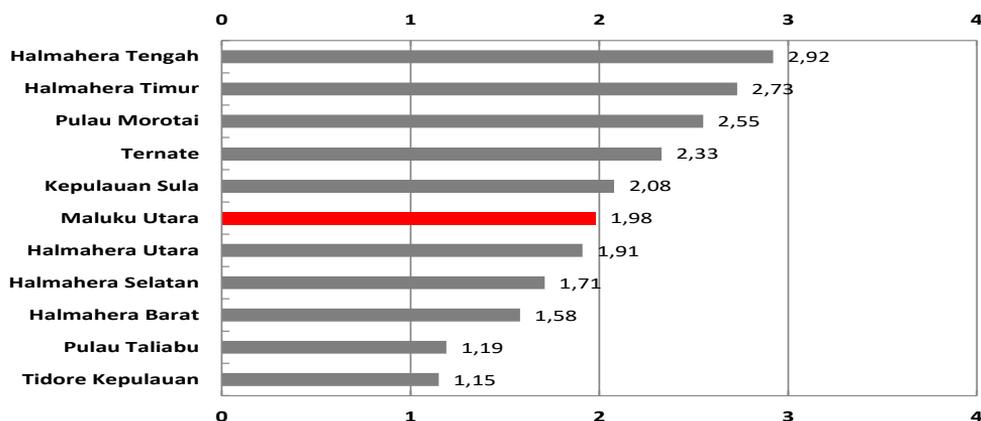
**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Maluku Utara, 2013-2017**

Indikator Demografi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk (Juta)	1,11	1,14	1,16	1,19	1,21
Laju Pertumbuhan Penduduk (persen/tahun)	2,18	2,13	2,08	2,03	1,98
Rasio Jenis Kelamin	104	104	104	104	104

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2016-2017 laju pertumbuhan penduduk di 5 kabupaten/kota berada di atas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Kota Ternate. Sementara itu, 5 kabupaten/kota lainnya mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Taliabu dan Kota Tidore Kepulauan bahkan mengalami laju pertumbuhan di bawah 1,50 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan di atas, perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah bahwa angka pertumbuhan penduduk di Maluku Utara tidak homogen. Hal ini menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya perbedaan atau disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan.

Dari 1,21 juta penduduk Maluku Utara pada tahun 2017, terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 0,62 juta (51,01 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 0,59 juta (48,99 persen). Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Maluku Utara pada tahun 2017 sebesar 104. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

**Gambar 1.1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2017**



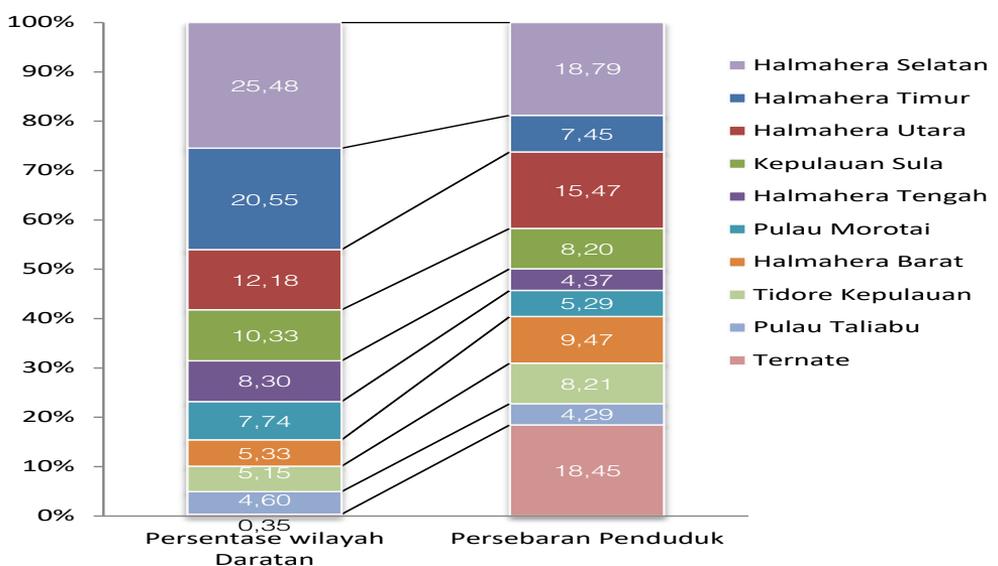
perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Bila dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota maka di Maluku Utara tidak terdapat kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Maluku Utara pada tahun 2017 adalah Kabupaten Halmahera Timur (110) dan Pulau Morotai (106) (Lampiran 2).

## Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Demikian juga halnya dengan distribusi penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

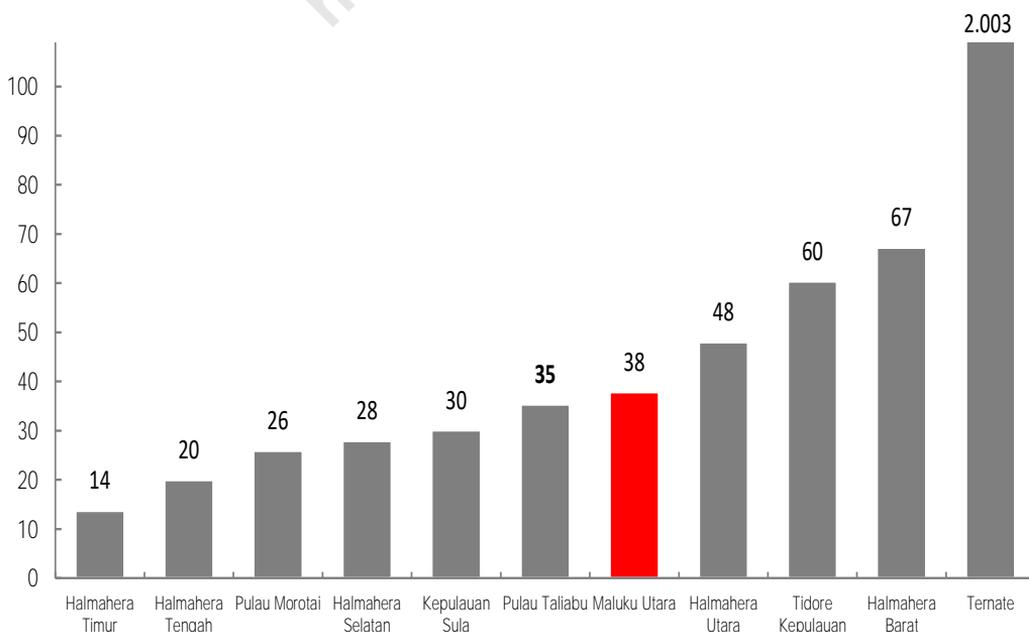
**Gambar 1.2 Persentase Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk, 2017**



Jika dilihat dari pola persebaran penduduk, Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan dengan persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang masih timpang. Berdasarkan Gambar 1.2, Kota Ternate adalah kota dengan luas daratan paling sempit di Maluku Utara yaitu 0,35 persen dari seluruh daratan di Maluku Utara akan tetapi berdasarkan persebaran penduduk Maluku Utara 2017, Kota Ternate dihuni sekitar 18,45 persen penduduk Maluku Utara. Sebaliknya, Halmahera Selatan sebagai kabupaten dengan wilayah daratan terluas (luasnya sekitar 25,48 persen dari seluruh wilayah daratan Maluku Utara), hanya dihuni oleh sekitar 18,79 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara. Kondisi lebih ekstrim terjadi di Halmahera Timur, sebagai daerah terluas kedua dengan wilayah daratan sebesar 20,55 persen daratan Maluku Utara, namun hanya dihuni 7,45 persen penduduk Maluku Utara. Dari persebaran penduduk ini dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk di Maluku Utara belum merata.

Ketimpangan persebaran penduduk di Maluku Utara menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota tidak merata. Kepadatan penduduk di Ternate yang luasnya paling kecil dari seluruh wilayah daratan Maluku Utara, mencapai 2.003 jiwa per km<sup>2</sup> pada 2017. Sebaliknya, kepadatan penduduk di sembilan kabupaten/kota lain yang memiliki wilayah lebih luas dari Ternate, kepadatan penduduknya kurang dari 70 jiwa per km<sup>2</sup>, bahkan di Halmahera Timur hanya 14 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan secara umum, kepadatan penduduk di Maluku Utara pada 2017 mencapai 38 jiwa per km<sup>2</sup>. Terdapat lima kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Halmahera Utara (48 jiwa per km<sup>2</sup>), Tidore Kepulauan (60 jiwa per km<sup>2</sup>), Halmahera Barat (67 jiwa per km<sup>2</sup>) dan Ternate (2.003 jiwa per km<sup>2</sup>).

**Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017**



Tingginya kepadatan penduduk di Kota Ternate sebagai wilayah tersempit di Maluku Utara mengindikasikan bahwa Ternate menjadi pilihan utama bagi para migran. Meskipun ibu kota provinsi sudah pindah ke Sofifi (Tidore Kepulauan), namun semua kegiatan masih terpusat di Ternate. Selain itu fasilitas-fasilitas umum di Ternate lebih lengkap dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan lebih proaktif untuk meningkatkan infrastrukturnya sehingga bisa meningkatkan daya tarik daerah masing-masing dan dapat mewujudkan persebaran dan kepadatan penduduk yang merata.

### Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2013 angka beban tanggungan Maluku Utara sebesar 62,47 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 62 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2015 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 60,18 persen dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 59,15 persen. Saat ini (tahun 2017), angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 59,67 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 59 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

**Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komposisi Penduduk					
0-14 Tahun	35,69	36,21	34,42	33,78	34,32
15-64 Tahun	61,55	61,88	62,43	63,00	62,63
65 Tahun +	2,76	2,91	3,15	3,21	3,05
Angka Beban Ketergantungan (persen)	62,47	61,60	60,18	59,15	59,67

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada sebanyak 35,69 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 34,32 persen pada tahun 2017. Pada Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Maluku Utara masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 61,55 persen pada tahun 2013 dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 63,00 persen dan sedikit menurun menjadi 62,63 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Maluku Utara menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) cenderung bertambah dari 2,76 persen pada tahun 2013 menjadi 3,21 persen pada tahun 2016 dan 3,05 persen pada tahun 2017.

## Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*), dan Angka Reproduksi Neto (*Net Reproductive Rate/NRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Indikator TFR mempunyai kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

**Tabel 1.3 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR), 2013-2017**

Indikator Fertilitas	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TFR	3,11	3,09	3,06	3,03	2,9

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035) sejak tahun 2013-2017 tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 3,11 menjadi 2,9. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 3 anak.

### Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu “variabel antara” yang berpengaruh langsung terhadap fertilitas. Ini dikarenakan pada saat perkawinan pertama, secara formal seorang wanita diasumsikan akan memasuki kehidupan seksual, yang berarti pula dimulainya masa menghadapi resiko melahirkan. Batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) harus berusia minimal 16 tahun.

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 -2017**

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-15	3,77	2,94	5,20	5,17	4,83	4,56
16-18	19,30	23,29	29,82	31,82	27,08	29,49
19-24	54,12	50,91	51,19	50,32	51,95	50,48
25 +	22,81	22,86	13,78	12,69	16,13	15,47

Sumber : Susenas 2017

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun pada tahun 2017 cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan yaitu 5,17 persen berbanding 2,94 persen. Demikian pula yang terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu di daerah perdesaan sebesar 31,82 persen dan di perkotaan sebesar 23,29 persen. Sebaliknya pada kelompok umur 19 tahun ke atas, di perkotaan memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Pada kelompok umur 19-24 tahun persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di perkotaan sebesar 50,91 persen sedangkan di perdesaan sebesar 50,32 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 25 tahun ke atas persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di perkotaan sebesar 22,86 persen sedangkan di perdesaan sebesar 12,69 persen.

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2017, dari 10 kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten/kota yang menunjukkan persentase wanita yang

melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun lebih tinggi dari persentase angka Maluku Utara. Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 11,08 persen diikuti oleh Kabupaten Halmahera Selatan dan Pulau Morotai masing-masing sebesar 5,38 persen dan 5,36 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kota Ternate sebesar 2,85 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat 4 kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur, sedangkan sisanya 6 kabupaten/kota justru mengalami kenaikan.

### Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Perkembangan cakupan ber-KB khususnya di Maluku Utara dapat dikatakan lambat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sekitar 50 persen yaitu masing-masing sebesar 49,13 persen pada tahun 2016 dan 50,40 persen pada tahun 2017. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan, yaitu sebesar 51,61 persen pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 53,17 persen pada tahun 2017. Sedangkan wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan yaitu sebesar 42,32 persen pada tahun 2016 kemudian meningkat sedikit menjadi 42,79 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi

**Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2016-2017**

Alat/Cara Kontrasepsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MOW/Tubektomi	0,90	0,86	0,33	0,43	0,46	0,52
MOP/Vasektomi	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,21
AKDR/IUD/Spiral	4,90	3,37	0,68	1,63	1,62	2,02
Suntikan	64,45	58,71	73,46	67,98	71,46	65,88
Susuk KB /norplan/ Implanon /Alwalit	17,11	20,95	14,69	19,32	15,23	19,69
Pil	11,72	14,13	7,74	9,56	8,62	10,60
Kondom/Karet/Intervag	0,00	0,47	0,25	0,08	0,19	0,17
Cara Tradisional	0,92	1,51	2,85	0,73	2,42	0,91
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	42,32	42,79	51,51	53,17	49,13	50,40

Sumber : Susenas 2017

pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

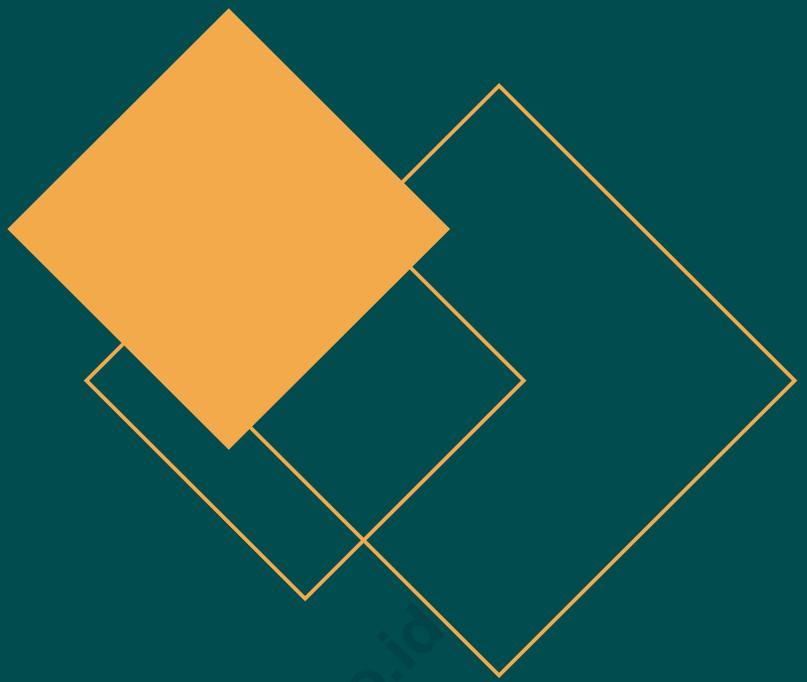
Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah Kondom/Karet/Intravag, MOP/Vasektomi, MOW/Tubektomi dan cara tradisional, masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, alat/cara KB yang mengalami peningkatan pengguna selama tahun 2016-2017 yaitu MOW/Tubektomi, MOP/Vasektomi, AKDR/IUD/Spiral, Susuk KB/Norplant dan Pil KB. Sebaliknya alat/cara KB yang mengalami penurunan pengguna selama tahun 2016-2017 adalah Suntikan, Kondom/Karet/Intervag dan cara tradisional.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tinggal di daerah perkotaan maupun di perdesaan sebagian besar memilih menggunakan alat/cara KB suntik. Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan alat/cara KB suntik di perdesaan lebih tinggi yaitu sebanyak 67,98 persen dibanding di daerah perkotaan yang hanya mencapai 58,71 persen. Sebaliknya wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang menggunakan alat/cara KB pil lebih banyak di daerah perkotaan dibanding pedesaan yaitu 14,13 persen berbanding 9,56 persen.

Sedangkan untuk alat/cara KB jangka panjang, baik di daerah perkotaan dan perdesaan lebih memilih alat/cara susuk KB/norplant/implanon/alwalit yang jumlahnya sebesar 17,11 persen pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 20,95

persen pada tahun 2017 untuk perkotaan, sementara itu di perdesaan jumlahnya juga meningkat dari 14,69 persen pada tahun 2016 menjadi 19,32 persen pada tahun 2017. Alat/cara KB jangka panjang lainnya seperti AKDR/IUD/Spiral belum menjadi alternatif pilihan oleh wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tinggal di daerah perkotaan maupun di perdesaan dilihat dari persentase penggunaannya yang hanya sebesar 3,37 persen untuk perkotaan dan 1,63 persen untuk perdesaan pada tahun 2017.

<https://malut.bps.go.id>



# KESEHATAN DAN GIZI

2

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan usia harapan hidup penduduknya. Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Maluku Utara telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup, tercatat dari berumur 67,24 tahun (tahun 2013) menjadi lebih panjang usia mencapai 67,44 tahun (tahun 2015) dan terakhir mencapai 67,54 tahun (tahun 2017). Peningkatan umur harapan hidup ini dikarenakan pengaruh dari beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

**Tabel 2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Angka Kematian Bayi (AKB), 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UHH	67,24	67,34	67,44	67,51	67,54
AKB	37,63	36,98	36,20	35,70	NA

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

Angka Kematian Bayi di Maluku Utara telah mengalami penurunan secara berangsur-angsur dari 38,37 pada tahun 2012 menjadi 35,70 pada tahun 2016. AKB di Maluku Utara masih termasuk tinggi karena di tahun 2016 terjadi 36 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kesehatan yang terkait erat dengan AKB yang telah disebutkan sebelumnya, namun saling tolak belakang ketika mewakili kondisi suatu wilayah. Maksudnya, jika suatu wilayah dengan AKB tinggi biasanya diikuti oleh UHH yang rendah. Sebaliknya yang terjadi bila UHH tinggi, maka diiringi oleh rendahnya AKB.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Maluku Utara mencapai 11,27 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 16,25 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2016 yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, masing-masing sekitar 11,94 persen dan 9,51 persen.

**Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2016-2017**

Daerah Tempat Tinggal	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit (hari)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	18,22	9,51	5,35	7,09
Perdesaan	15,52	11,94	6,51	6,53
Perkotaan + Perdesaan	16,25	11,27	6,19	6,66

Sumber : Susenas 2017

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Menurunnya angka kesakitan (morbiditas) pada tahun 2017 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2017 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari. Selama tahun 2017, rata-rata lama sakit penduduk di perkotaan sedikit lebih lama dibandingkan yang tinggal di perdesaan.

Rata-rata lama sakit penduduk yang tinggal di perdesaan pada tahun 2016 sekitar 6,51 hari dan meningkat menjadi 6,53 hari pada tahun 2017. Rata-rata lama sakit di daerah perkotaan pada periode yang sama meningkat dari 5,35 hari menjadi 7,09 hari pada tahun 2017. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

### Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/ minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

**Tabel 2.3 Persentase Anak Usia < 24 Bulan yang Pernah Diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI, 2016-2017**

Daerah Tempat Tinggal	Anak Usia <24 bulan yang Pernah Diberi ASI (%)		Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	82,19	98,72	10,73	10,00
Perdesaan	92,09	94,44	10,32	10,68
Perkotaan + Perdesaan	89,12	95,68	10,44	10,48

Sumber : Susenas 2017

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI di Maluku Utara ada sebanyak 95,68 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal ternyata persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, masing-masing sekitar 98,72 persen dan 94,44 persen. Dianjurkan seorang ibu

dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama pemberian ASI pada tahun 2017 di Maluku Utara hanya sekitar 10 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

**Tabel 2.4 Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2016-2017**

Jenis Imunisasi	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	86,87	83,51	89,31	84,98	88,07	84,25
DPT	79,04	76,93	81,71	77,80	80,36	77,37
Polio	88,87	81,99	89,31	81,49	89,09	81,74
Campak	69,64	53,22	71,76	54,42	70,69	53,83
Hepatitis B	74,25	73,06	78,27	74,22	76,24	73,64

Sumber : Susenas 2017

Hasil Susenas 2017, mayoritas anak umur 0-59 bulan (balita) di Maluku Utara sudah mendapatkan imunisasi wajib. Balita yang mendapatkan imunisasi BCG sudah mencapai 84,25 persen sedangkan untuk imunisasi Polio sekitar 81,74 persen. Sementara itu, balita yang mendapatkan imunisasi DPT hanya sebesar 77,37 persen sedangkan untuk imunisasi campak dan hepatitis B masih di bawah 75 persen yaitu sekitar 53,83 persen untuk balita yang mendapat imunisasi campak dan 73,64 persen untuk balita yang mendapat imunisasi hepatitis B.

Sementara, balita yang pernah mendapat imunisasi menurut kabupaten/kota, dapat dilihat di Lampiran 5. Berdasarkan hasil Susenas 2017 persentase anak umur 0-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib (BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B) paling sedikit terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu masing-masing sebesar 57,87 persen imunisasi BCG, 48,74 persen imunisasi DPT, 61,77 persen imunisasi Polio, 39,24 persen imunisasi campak dan 42,90 persen imunisasi Hepatitis B. Sedangkan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi untuk semua jenis imunisasi adalah Kota Tidore Kepulauan, dimana untuk imunisasi BCG mencapai 98,58 persen.

## Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan proses persalinan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan di Maluku Utara pada tahun 2017 sebanyak 71,38 persen. Hal tersebut disebabkan oleh peran bidan sebagai penolong persalinan, baik di perkotaan (57,72 persen) maupun di perdesaan (55,98 persen). Penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter di daerah perkotaan sebanyak 30,57 persen sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 8,50 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi terutama di daerah perdesaan, persentasenya adalah 33,86 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebanyak 11,31 persen.

**Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Persalinan Terakhir Menurut Penolong Persalinan, 2016-2017**

Penolong Proses Persalinan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Kesehatan	91,70	88,37	64,28	64,81	72,80	71,38
-Dokter	41,31	30,57	11,49	8,50	20,75	14,65
-Bidan	50,01	57,72	50,43	55,98	50,30	56,47
-Lainnya	0,38	0,07	2,36	0,33	1,75	0,26
Bukan Tenaga Kesehatan	8,30	11,63	35,72	35,19	27,20	28,62
-Dukun Tradisional	6,89	11,31	34,82	33,86	26,14	27,57
-Lainnya	1,41	0,32	0,90	1,33	1,06	1,04

Sumber : Susenas 2017

Tenaga penolong persalinan yang memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti dukun di saat proses melahirkan. Lebih rinci pengamatan per kabupaten/kota di Maluku Utara sepanjang tahun 2017 menunjukkan bahwa untuk lainnya yang mencakup perawat dan dukun beranak sebagai penolong persalinan di

beberapa kabupaten/kota masih sangat tinggi bahkan ada yang di atas 50 persen yaitu Kabupaten Pulau Taliabu (58,23 persen). Kondisi yang demikian ini diduga erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan ibu dan kemampuan ekonomi keluarga yang disertai fasilitas kesehatan yang terbatas di daerah tersebut.

Sebaliknya angka persalinan yang dilakukan oleh lainnya di Kota Ternate relatif kecil sebesar 6,49 persen. Seiring dengan rendahnya penolong kelahiran yang dibantu oleh dukun, maka diimbangi dengan tingginya persentase penolong oleh tenaga medis yang ada di wilayah ini yaitu tenaga penolong kelahiran oleh bidan sebesar 52,69 persen sedangkan untuk penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter mencapai 40,82 persen untuk Ternate. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk di perkotaan yang berobat ke fasilitas praktek dokter/bidan/klinik pada tahun 2017 sebesar 46,61 persen dan 31,92 persen yang berobat ke puskesmas. Tempat rujukan berobat praktek dokter/klinik di wilayah perkotaan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) dan sebaliknya terjadi penurunan penduduk yang memanfaatkan berobat ke puskesmas dari 38,31 persen pada tahun 2016 menjadi 31,92 persen pada tahun 2017. Sementara itu, penduduk yang berobat ke dukun bersalin dan lainnya mengalami penurunan, yaitu dari 1,41 persen pada tahun 2016 menjadi 0,31 persen pada tahun 2017. Sedangkan penduduk yang berobat ke pengobatan tradisional mengalami peningkatan dari 2,44 persen pada tahun 2016 menjadi 3,21 persen pada tahun 2017.

Sementara itu, penduduk di perdesaan pada tahun 2017 cenderung lebih memilih tempat berobat ke puskesmas yaitu sekitar 58,71 persen karena fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia di daerah perdesaan.

Selain itu juga persentase penduduk di perdesaan yang berobat ke rumah sakit dan dukun bersalin dan lainnya secara berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2017 masing-masing menjadi 12,20 persen dan 1,08 persen. Sementara penduduk yang berobat ke praktek dokter/bidan/klinik dan puskesmas justru mengalami peningkatan pada tahun 2017 masing-masing menjadi 22,51 persen dan 58,71 persen.

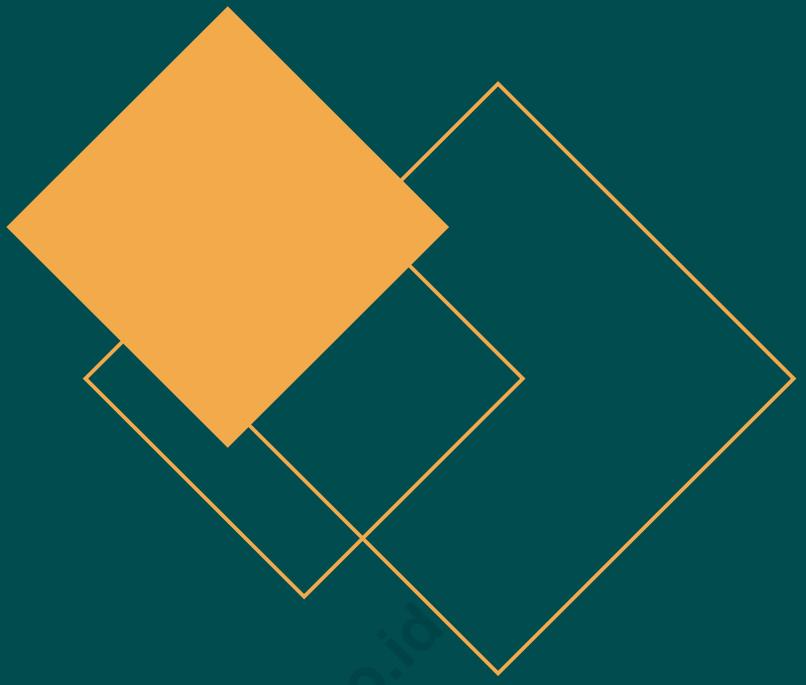
**Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2016-2017**

Tempat Berobat	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sakit	22,73	22,75	13,42	12,20	12,21	15,04
Praktek Dokter/ Bidan/Klinik	38,41	46,61	22,29	22,51	27,14	29,01
Puskesmas	38,31	31,92	56,42	58,71	50,97	51,49
UKBM	-	2,96	-	8,69	-	7,15
Pengobatan Tradisional	2,44	3,21	2,33	1,90	2,36	2,25
Dukun Bersalin dan Lainnya	1,41	0,31	10,82	1,08	7,99	0,87

Sumber : Susenas 2017

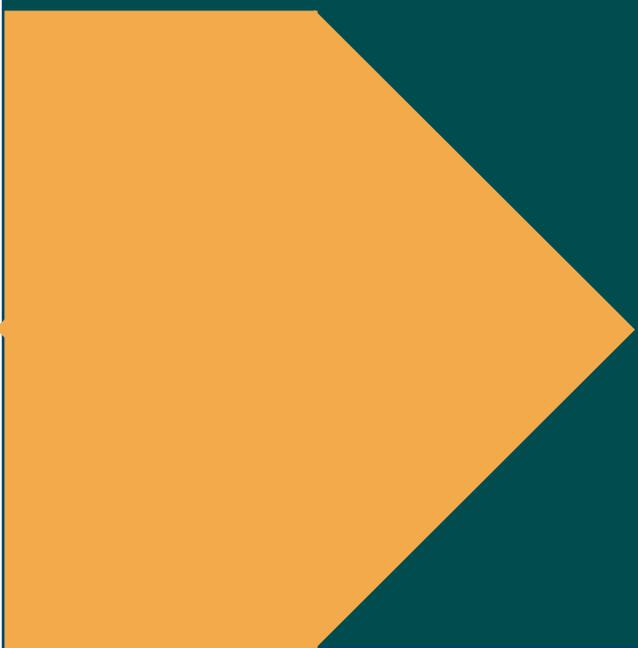
Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



<https://malut.bps.go.id>

# PENDIDIKAN



# 3

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Relevansi pendidikan merupakan konsep “link and match”, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Peningkatan AMH penduduk usia 15 tahun ke atas terjadi pada semua kelompok umur kecuali kelompok umur 20-24 tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok umur 50 ke atas. Pada kelompok umur ini tercatat AMH naik dari 93,87 persen pada tahun 2016 menjadi 95,14 persen pada tahun 2017. Peningkatan paling kecil terjadi pada kelompok umur 35-49 tahun yaitu dari 99,02persen menjadi 99,41

persen. Pada tahun 2017 AMH penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 99,92 persen, kelompok umur 20-24 tahun sebesar 99,49 persen, dan kelompok umur 25-34 tahun sebesar 99,78 persen.

**Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017**

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	99,83	100,00	99,17	99,89	99,37	99,92
20-24	100,00	99,60	99,48	99,44	99,67	99,49
25-34	99,49	100,00	99,03	99,68	99,16	99,78
35-49	99,71	99,89	98,76	99,24	99,02	99,41
50+	97,30	97,93	92,67	94,04	93,87	95,14
15 +	99,25	99,48	97,63	98,35	98,10	98,68
Laki-Laki	99,70	99,87	98,34	99,05	98,72	99,29
Perempuan	98,80	99,08	96,90	97,62	97,45	98,04

Sumber : Susenas 2017

Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki mengalami peningkatan dari 98,72 persen menjadi 99,29 persen. Hal ini terjadi karena didorong oleh peningkatan AMH baik di perkotaan maupun di perdesaan. AMH penduduk laki-laki di perkotaan pada tahun 2017 tercatat sebesar 99,87 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 98,05 persen. AMH penduduk perempuan pada tahun yang sama mengalami peningkatan juga dari 97,45 persen menjadi 98,04 persen. Hal ini berkaitan dengan angka melek huruf di perkotaan dan perdesaan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. AMH penduduk perempuan di perkotaan pada tahun 2017 tercatat sebesar 99,08 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 97,62 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum AMH laki-laki lebih tinggi daripada AMH perempuan.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas di perkotaan (99,48 persen) menunjukkan nilai lebih tinggi dari AMH di perdesaan (98,35 persen). Dari pencapaian AMH tersebut baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan bahwa angka buta huruf tercatat sudah di bawah 5 persen. Namun demikian, pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah.

## Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

**Tabel 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	7,55	7,71	7,77	7,86	7,87
Halmahera Tengah	7,69	7,74	7,85	8,14	8,37
Kepulauan Sula	7,86	7,91	7,95	7,96	8,33
Halmahera Selatan	6,99	7,03	7,15	7,42	7,43
Halmahera Utara	7,97	7,98	8,06	8,35	8,36
Halmahera Timur	7,33	7,34	7,57	7,77	7,89
Pulau Morotai	6,81	6,84	6,84	6,88	6,89
Pulau Taliabu	7,39	7,40	7,41	7,42	7,43
Ternate	11,06	11,11	11,12	11,13	11,25
Tidore Kepulauan	8,61	8,72	8,91	9,11	9,39
Maluku Utara	8,27	8,34	8,37	8,52	8,61

Sumber : Susenas 2017

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 di Maluku Utara sebesar 8,61 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,52 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Maluku Utara mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Bila diamati dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara terdapat 2 wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah di atas angka Maluku Utara yaitu Kota Ternate (11,25 tahun) dan Kota Tidore Kepulauan (9,39 tahun), dengan kata lain penduduk Ternate sudah menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMA atau putus di kelas 3 SMA sedangkan penduduk Tidore Kepulauan sudah menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP atau putus di kelas 1 SMA.

## Tingkat Pendidikan

Indikator lain yang dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki atau ijazah pendidikan terakhirnya. Indikator tingkat pendidikan pada publikasi ini menggunakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan/ijazah terakhir yang ditamatkannya. Pada 2017, secara umum penduduk umur 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas relatif lebih rendah dibanding penduduk yang maksimal menamatkan pendidikan SD yaitu 49,96 persen.

Jika dilihat dari tipe daerah, terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding penduduk di perdesaan. Sebagian besar penduduk di perkotaan pada tahun 2017 berpendidikan dasar 17,11 persen, 16,37 persen telah berpendidikan SMP, 36,44 persen berpendidikan SMA/SMK/MA, dan 14,42 persen telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, yang sebagian besar masih berpendidikan SD (30,05 persen) bahkan juga masih banyak yang tidak berijazah (tidak sekolah atau tidak tamat SD) sebanyak 27,01 persen.

**Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017**

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Mempunyai Ijazah	12,37	15,22	25,96	27,01	22,58	23,66
SD/MI	26,03	17,11	36,83	30,05	34,14	26,38
SMP/MTS	11,62	16,37	11,55	18,13	11,57	17,63
SMA/SMK	34,89	36,44	20,42	18,01	24,02	23,24
MA/MAK	0,78	0,44	0,30	0,38	0,42	0,39
Diploma I/II	0,70	0,53	0,65	0,85	0,66	0,76
Diploma III/ Sarjana Muda	1,70	1,77	0,57	0,86	0,85	1,12
Diploma IV / S1/S2/S3	11,90	12,12	3,73	4,71	5,77	6,81

Sumber : Susenas 2017

Bila dibandingkan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan menurut kabupaten/kota, tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Secara umum pada tahun 2017 penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SMP ke atas mencapai 52,89 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 46,91

persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada tingkat pendidikan SD/belum tamat SD/ tidak bersekolah. Penduduk laki-laki dengan tingkat pendidikan SD/belum tamat SD/ tidak bersekolah justru lebih rendah dari perempuan (47,11 persen berbanding 53,09 persen). Kondisi yang sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada Lampiran 8.

### Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017**

Tingkat Pendidikan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	L	98,41	99,48	99,24	99,09	99,06	99,19
	P	100,00	99,85	99,00	98,98	99,24	99,19
	L + P	99,21	99,65	99,13	99,04	99,14	99,19
13-15	L	96,15	98,01	96,44	96,77	96,37	97,06
	P	97,00	98,82	97,58	96,90	97,43	97,42
	L + P	96,57	98,43	97,01	96,83	96,90	97,24
16-18	L	82,72	87,40	73,07	75,20	75,86	78,42
	P	83,23	84,66	72,23	69,44	75,28	73,37
	L + P	82,96	86,14	72,66	72,49	75,58	76,06

Sumber : Susenas 2017

Berdasarkan data Susenas tahun 2017, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berumur 7- 12 tahun sebesar 99,19 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang sebesar 99,14 persen, sedangkan penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 97,24 persen atau mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya yang sebesar 96,90 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur berumur 16-18 tahun juga mengalami kenaikan dari 75,58 persen menjadi 76,06 persen. Peningkatan APS pada semua kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, pada tahun 2017 APS penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan pada semua kelompok umur. APS kelompok umur 7-12 tahun di perkotaan sebesar 99,65 persen sedangkan di perdesaan sebesar 99,04 persen. Sementara itu, APS pada kelompok umur 13-15 tahun di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 98,43 persen dan 96,83 persen. Kesenjangan mulai terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu APS di perkotaan sebesar 86,14 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 72,49 persen. Walaupun demikian kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan semakin menurun bila dibandingkan tahun 2016. Pemerintah harus terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau bagi masyarakat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki. APS penduduk perempuan pada semua kelompok umur lebih tinggi bila dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali kelompok umur 16-18 tahun. APS penduduk perempuan tahun 2017 pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,19 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 99,19 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS penduduk perempuan sebesar 97,42 persen dan penduduk laki-laki sebesar 97,06 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan sebesar 73,37 persen berbanding 78,42 persen (APS penduduk laki-laki). Perbedaan APS penduduk perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Peningkatan APS yang terjadi pada tahun 2017 juga terjadi pada Angka Partipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Secara umum APM SD sebesar 97,01 persen pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,75 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 75,68 persen menjadi 76,26 persen. Sama halnya dengan APM SD dan SMP, APM SMA juga mengalami kenaikan dari 63,47 persen menjadi 63,52 persen. Peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan tersebut juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, baik APM SD di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, sebaliknya APM SMP dan SMA di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. APM SD di perdesaan mencapai 97,79 persen sedangkan di perkotaan sebesar 94,57 persen. Pada APM SD tampak kesenjangan antara APM perkotaan dan APM perdesaan dapat dikatakan kecil dan kesenjangan semakin besar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, APM SMP di perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 75,96 persen dan 77,13 persen. Pada APM SMP kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan mencapai 1,16 persen. Kesenjangan semakin besar pada APM SMA dengan APM perkotaan sebesar 67,44 persen dan

APM perdesaan sebesar 62,14 persen sehingga tingkat kesenjangan mencapai 5,30 persen. Pemerintah diharapkan terus menekan kesenjangan APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi antara perkotaan dan perdesaan dengan memberikan kemudahan akses pendidikan di perdesaan.

**Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2016-2017**

Tingkat Pendidikan		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI <sup>1)</sup>	L	93,79	94,35	98,13	97,44	97,20	96,68
	P	91,13	94,80	97,86	98,16	96,25	97,35
	L + P	92,45	94,57	98,00	97,79	96,75	97,01
S M P / MTS <sup>2)</sup>	L	65,01	77,68	73,67	74,60	71,50	75,33
	P	75,91	76,62	81,13	77,43	79,84	77,22
	L + P	70,42	77,13	77,42	75,96	75,68	76,26
S M A / S M K / MA <sup>3)</sup>	L	68,03	65,83	58,60	62,38	61,33	63,29
	P	71,00	69,31	63,82	61,86	65,81	63,79
	L + P	69,42	67,44	61,12	62,14	63,47	63,52

Catatan : 1)Termasuk Paket A

2)Termasuk Paket B

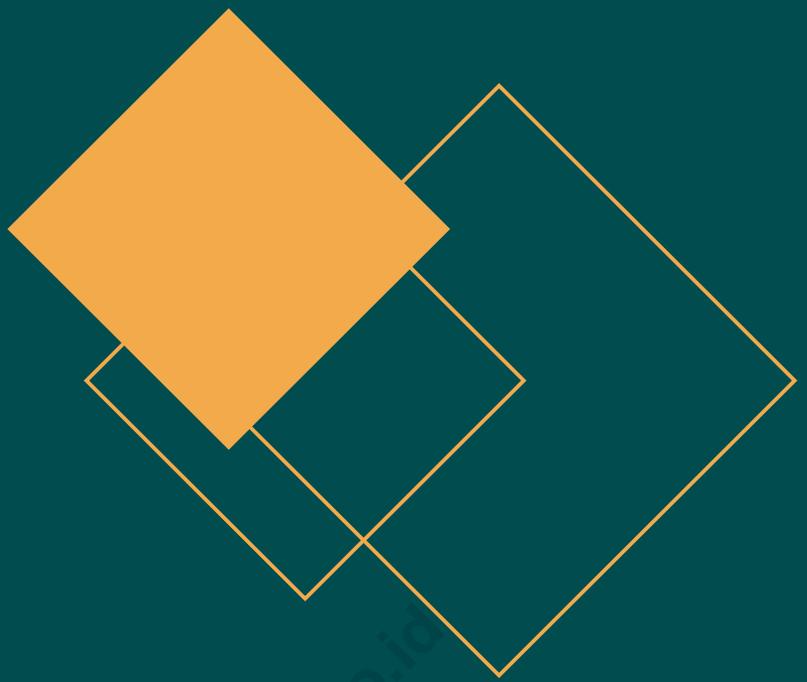
3)Termasuk Paket C

Sumber : Susenas 2017

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM SD laki-laki terlihat lebih rendah bila dibandingkan APM SD perempuan. APM SD penduduk laki-laki sebesar 96,68 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan yang sebesar 97,35 persen. Kondisi yang sama terjadi pada APM SMP, APM SMP penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan. APM SMP penduduk laki-laki tercatat sebesar 75,33 persen dan penduduk perempuan sebesar 77,22 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. APM penduduk perempuan sebesar 63,79 persen berbanding 63,29 persen (APM SMA penduduk laki-laki).

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



# KETENAGAKERJAAN

4

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Masalah di bidang ketenagakerjaan adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi pemerintah. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2016 dan 2017 kondisi Agustus dan Februari. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2017 mencapai 516,2 ribu orang, berkurang sebanyak 8,3 ribu orang dibanding Agustus 2016. Jumlah penduduk yang bekerja di Maluku Utara pada Agustus 2017 mencapai 488,7 ribu orang, berkurang 14,8 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2016. Dari jumlah angkatan kerja tersebut TPAK bergerak turun di perkotaan sebesar 4,15 persen dari

66,76 persen di tahun 2016 menjadi 62,61 persen di tahun 2017. Hal yang sama terjadi di perdesaan dimana penurunan TPAK sebesar 1,87 persen, dari 65,95 persen di tahun 2016 menjadi 64,08 persen pada tahun 2017. Secara keseluruhan TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan menurun sebesar 2,54 persen, dari 66,19 persen menjadi 63,65 persen.

**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016-2017**

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	66,76	62,61	4,54	7,22
Perdesaan	65,95	64,08	3,79	4,57
Perkotaan + Perdesaan	66,19	63,65	4,01	5,33

Sumber : Sakernas 2017

TPT bergerak naik baik di perkotaan maupun di perdesaan dimana peningkatan TPT di perkotaan sebesar 2,67 persen dari 4,54 persen pada Agustus 2016 menjadi 7,22 persen pada Agustus 2017. Peningkatan TPT di daerah perdesaan pada 2017 sebesar 0,78 persen dibandingkan 2016 dari 3,79 persen menjadi 4,57 persen. Secara keseluruhan TPT di perkotaan dan perdesaan naik sebesar 1,32 persen dari 4,01 persen di tahun 2016 menjadi 5,33 persen di tahun 2017. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, dimana tingkat TPT perkotaan sebesar 7,22 persen dan di perdesaan sebesar 4,57 persen. Jumlah penganggur pada Agustus 2017 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 6,5 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2016, dan bertambah sebanyak 9,3 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2016.

Pada tahun 2017 bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan daripada di perdesaan. TPT di perkotaan terlihat lebih tinggi bila dibandingkan di perdesaan yaitu sebesar 7,22 persen berbanding 4,57 persen. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, dimana sektor ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus. Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan.

## Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Untuk daerah perkotaan penurunan TPT terjadi pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah yang turun sebesar 0,29 persen dari 2,45 persen pada 2016 menjadi 2,16 persen pada 2017. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang tidak/belum bersekolah maupun tamatan SD semakin banyak. Sebaliknya di perdesaan angka TPT untuk mereka yang berpendidikan SD ke bawah naik 0,66 persen, dari 1,63 persen menjadi 2,30 persen.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2016-2017**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	2,45	2,16	1,63	2,30	1,79	2,28
SMP	0,00	5,85	0,64	3,16	0,46	3,84
SMA Umum	7,36	11,58	4,88	8,53	5,75	9,65
SMA Kejuruan	5,07	7,11	4,69	9,55	4,85	8,15
Diploma I/II/III	13,26	8,96	3,86	7,43	7,17	7,92
Universitas	4,28	5,95	18,52	6,75	11,44	6,35
<b>Total</b>	<b>4,54</b>	<b>7,22</b>	<b>3,79</b>	<b>4,57</b>	<b>4,01</b>	<b>5,33</b>
<b>SMA +</b>	<b>6,59</b>	<b>8,87</b>	<b>7,48</b>	<b>8,10</b>	<b>7,13</b>	<b>8,42</b>

Sumber : Sakernas 2017

Hal yang menarik adalah di tahun 2017 TPT penduduk yang berpendidikan SMK lebih kecil dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA khususnya di perkotaan. TPT penduduk yang berpendidikan SMK di perkotaan sebesar 7,11 persen lebih kecil dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA di perkotaan sebesar 11,58 persen.

Sebaliknya TPT penduduk yang berpendidikan SMK di perdesaan sebesar 9,55 persen sedikit lebih tinggi dari TPT penduduk yang berpendidikan SMA di perdesaan sebesar 8,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SMK di perkotaan sudah mulai terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan diploma sedikit meningkat di tahun 2017, sebaliknya TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan universitas cenderung menurun. TPT untuk penduduk yang berpendidikan universitas di perkotaan meningkat sebesar 1,67 persen, dari 4,28 persen di tahun 2016 menjadi 5,95 persen di tahun 2017. Namun di perdesaan terjadi penurunan sebesar 11,77 persen, dari 18,52 persen di tahun 2016 menjadi 6,75 persen di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan universitas lebih banyak diterima lapangan usaha di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan.

Sebaliknya penduduk dengan tingkat pendidikan diploma lebih banyak diterima lapangan usaha di daerah perdesaan dibandingkan di perkotaan dimana TPT untuk penduduk yang berpendidikan diploma di perkotaan menurun sebesar 4,29 persen, dari 13,26 persen di tahun 2016 menjadi 8,96 persen di tahun 2017. Namun di perdesaan terjadi peningkatan sebesar 3,57 persen, dari 3,86 persen di tahun 2016 menjadi 7,43 persen di tahun 2017.

Secara umum di tahun 2017 TPT penduduk di daerah perdesaan meningkat di semua tingkat jenjang pendidikan kecuali universitas. Penduduk dengan pendidikan SMA Kejuruan menjadi kelompok penganggur terbanyak. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

## Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan Sakernas 2017, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,10 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 40,82 persen pada tahun 2016 menjadi 40,72

persen pada tahun 2017. Penurunan terbesar terjadi di daerah perkotaan yang mengalami penurunan sebesar 4,72 persen, dari 14,31 persen di tahun sebelumnya menjadi 9,60 persen di tahun 2017. Sebaliknya di perdesaan terjadi peningkatan sebesar 0,92 persen dari 52,00 persen di tahun 2016 menjadi 52,92 persen pada tahun 2017.

Kondisi yang sama terjadi pada sektor industri dimana di sektor ini terjadi penurunan sebesar 0,42 persen, menurun dari 16,62 persen di tahun 2016 menjadi 16,20 persen di tahun 2017. Penurunan di sektor industri terjadi karena adanya penurunan penduduk yang bekerja di sektor industri baik di daerah perkotaan sebesar 6,27 persen atau menurun dari 20,82 persen di tahun 2016 menjadi 14,86 persen di tahun 2017. Sebaliknya penduduk yang bekerja di sektor industri di daerah perdesaan meningkat 1,99 persen dari 14,85 persen di tahun 2016 menjadi 16,84 persen di tahun 2017.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2016-2017**

Kelompok Usaha	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	14,31	9,60	52,00	52,92	40,82	40,72
Industri (M)	20,82	14,56	14,85	16,84	16,62	16,20
Jasa-Jasa (S)	64,86	75,84	33,16	30,24	42,56	43,08

Catatan : Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.  
Cakupan lapangan usaha Industri(M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air; Bangunan.  
Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan

Sumber : Sakernas 2017

Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor jasa dimana penduduk yang bekerja di sektor ini secara umum meningkat 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya, naik dari 42,56 persen di tahun 2016 menjadi 43,08 persen di tahun 2017. Peningkatan terjadi di daerah perkotaan yang meningkat sebesar 10,98 persen, dari 64,86 persen di tahun 2016 menjadi 75,84 persen di tahun 2017. Sebaliknya di perdesaan terjadi penurunan sebesar 2,92 persen, dari 33,16 persen di tahun 2016 menjadi 30,24 persen di tahun 2017. Namun di perkotaan sektor jasa merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja (75,84 persen) dibandingkan di perdesaan yang hanya sebesar 30,24 persen dimana di daerah perdesaan sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (52,92 persen). Hal tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang beralih dari sektor pertanian ke industri dan sektor jasa-jasa. Peningkatan penduduk yang

bekerja di sektor jasa dapat diartikan bahwa sektor ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar di daerah perdesaan, sedangkan sektor jasa-jasa lebih banyak menyerap tenaga kerja di daerah perkotaan. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang tersedia di perdesaan, sementara lahan di perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar sektor pertanian.

Pada tahun 2017 di daerah perdesaan sektor jasa-jasa menyerap 30,24 persen, dimana terjadi penurunan sebesar 2,92 persen dibandingkan tahun 2016. Sedangkan sektor industri di daerah perdesaan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16,84 persen, dimana terjadi peningkatan sebesar 1,99 persen dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 di daerah perdesaan terjadi pergeseran komposisi tenaga kerja dari sektor jasa-jasa sebanyak 0,92 persen yang berpindah ke sektor pertanian dan 1,99 persen ke sektor industri.

Sementara itu, sebanyak 75,84 persen penduduk yang bekerja di daerah perkotaan bekerja di sektor jasa-jasa dimana di sektor ini terjadi peningkatan sebesar 10,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan pergeseran komposisi tenaga kerja yang berpindah dari sektor pertanian dan sektor industri yang masing-masing berpindah sebesar 4,72 dan 6,27 persen. Cakupan lapangan usaha pada sektor jasa-jasa adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan. Sektor jasa-jasa yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar di daerah perkotaan menunjukkan bahwa sektor ini memang menjadi andalan bagi penduduk perkotaan untuk mencari penghasilan.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/ karyawan adalah sebesar 34,98 persen atau mengalami peningkatan sebanyak 2,96 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri yang meningkat sebesar 1,80 persen, dari 21,32 persen di tahun 2016 menjadi 23,12 persen di tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada pekerja yang berstatus pekerja bebas baik di non pertanian yang mengalami peningkatan sebesar 3,36 persen. Sebaliknya jumlah pekerja yang berstatus berusaha dibantu pekerja tak dibayar dan dibayar masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,18 persen dan 0,89 persen. Penurunan juga terjadi pada pekerja yang berstatus pekerja bebas pertanian sebesar 2,23 persen dan pekerja tak dibayar sebesar 2,82 persen.

Meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan terjadi di wilayah perdesaan yang bertambah sebesar 2,36 persen dibanding tahun sebelumnya, dari 25,58 persen di tahun 2016 menjadi 27,94 persen di tahun 2017. Peningkatan juga terjadi pada penduduk dengan status berusaha sendiri dan pekerja bebas non pertanian yang meningkat sebesar 3,15 persen dan 2,77 persen dari tahun

sebelumnya. Peningkatan jumlah pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap, buruh/karyawan dan pekerja bebas non pertanian di daerah perdesaan tahun 2017 berasal dari penduduk yang berstatus sebagai berusaha dibantu baik pekerja tidak tetap maupun pekerja tetap, pekerja bebas pertanian dan pekerja tidak dibayar.

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2016-2017**

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	23,02	21,49	20,60	23,75	21,32	23,12
Berusaha Dibantu Pekerja Tak dibayar	13,32	9,33	21,89	20,24	19,35	17,17
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap	3,06	2,77	4,34	3,19	3,96	3,07
Buruh/karyawan	47,27	52,95	25,58	27,94	32,01	34,98
Pekerja Bebas Pertanian	3,65	0,60	6,58	4,61	5,71	3,48
Pekerja Bebas Non Pertanian	0,00	4,86	0,00	2,77	0,00	3,36
Pekerja Keluarga	9,68	8,01	21,01	17,49	17,65	14,82

Sumber : Sakernas 2017

Sementara itu di perkotaan, pada tahun 2017 penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan masih menjadi yang terbesar dengan persentase sebesar 52,95 persen, atau meningkat sebesar 5,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas non pertanian yang naik sebesar 4,86 persen, dari 0,00 persen di tahun 2016 menjadi 4,86 persen di tahun 2017. Sebaliknya penurunan terjadi pada penduduk yang berstatus berusaha sendiri (1,53 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (3,99 persen), berusaha dibantu buruh tetap (0,29 persen), pekerja bebas pertanian (3,05 persen) dan pekerja tak dibayar (1,67 persen) di tahun 2017.

### Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan

yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

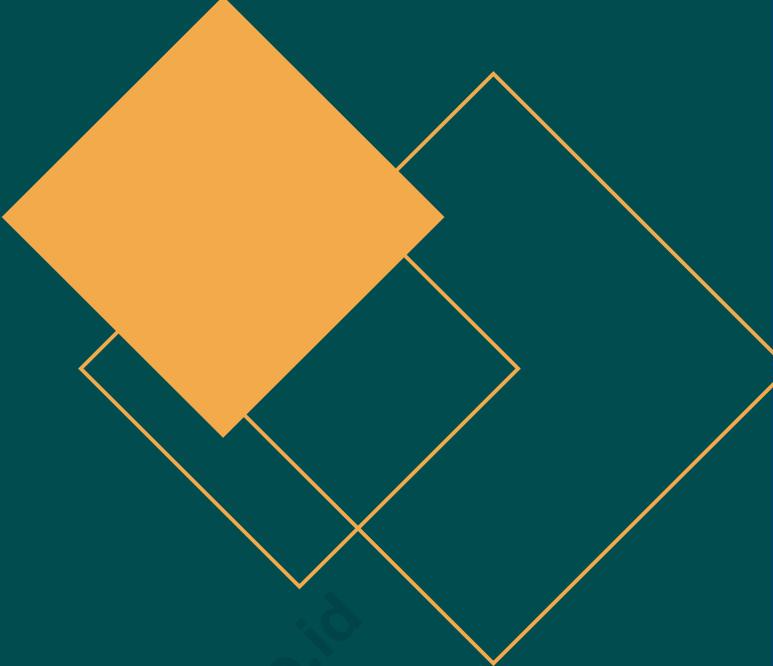
Secara umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu yang lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yakni dari 31,92 persen menjadi 35,16 persen. Di daerah perkotaan persentase pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal meningkat dari 23,40 persen pada tahun 2016 menjadi 27,27 persen pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, dari 35,51 persen pada tahun 2016 menjadi 38,25 persen pada tahun 2017. Kondisi ini mengindikasikan pekerja yang dikategorikan setengah pengangguran di Maluku Utara selama setahun terakhir semakin meningkat.

**Tabel 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Selama Seminggu, 2016-2017**

Jumlah Jam Kerja Seminggu	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	4,53	3,19	2,34	2,75	2,99	2,87
1-7	1,14	1,43	1,63	2,55	1,49	2,23
8-14	2,91	4,37	6,79	6,01	5,64	5,55
15 - 24	6,15	7,10	9,51	12,75	8,52	11,16
25 - 34	8,68	11,18	15,23	14,20	13,29	13,35
35 +	76,60	72,73	64,49	61,75	68,08	64,84

Sumber : Sakernas 2017

Sementara itu, persentase penduduk yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja dengan jam kerja 0 (nol) jam di perkotaan turun dari 4,53 persen pada tahun 2016 menjadi 3,19 persen di tahun 2017. Sebaliknya di perdesaan persentase penduduk tersebut naik dari 2,34 persen menjadi 2,75 persen di tahun 2017.



**POLA KONSUMSI**  
POLA KONSUMSI

<https://publit.bps.go.id>



**5**

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Seperti hukum yang dikemukakan oleh Ernst Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan, hukum ini ditemukan Engel dari perangkat data survei pendapatan dan pengeluaran.

### Pengeluaran Rumah Tangga

Secara umum data konsumsi/pengeluaran Susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

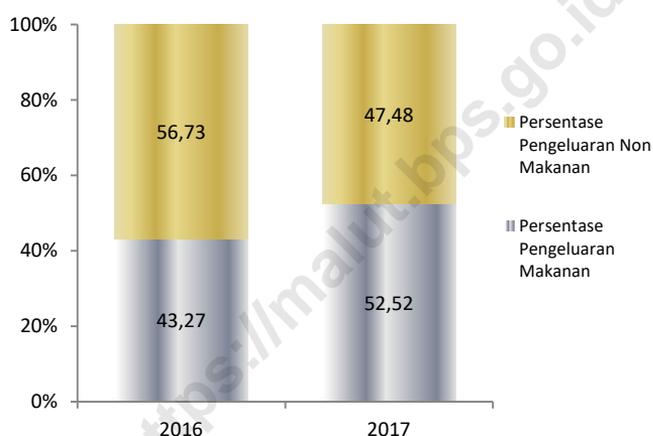
**Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2017**

Daerah Tempat Tinggal	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	413.580	486.734	43,27	52,52
Bukan Makanan	542.188	440.060	56,73	47,48
Perumahan	331.918	248.006	34,73	26,76
Barang dan Jasa	131.240	102.532	13,73	11,06
Pakaian	33.258	31.564	3,48	3,41
Barang Tahan Lama	24.673	27.415	2,58	2,96
Lainnya	21.099	30.543	2,21	3,30
Jumlah	955.768	926.795	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2017

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2016 dan 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk menurun dari Rp 955.768,- menjadi Rp 926.795,-. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan justru mengalami peningkatan dari 43,27 persen pada tahun 2016 menjadi 52,52 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran non makanan menurun dari 56,73 persen menjadi 47,48 persen. Penurunan terbesar pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada pengeluaran untuk perumahan yang turun dari 34,73 persen pada tahun 2016 menjadi 26,76 persen pada tahun 2017.

**Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017**



Gambar 5.1 menunjukkan adanya pergeseran pola pengeluaran selama 2016-2017. Pada 2016, penduduk di Maluku Utara lebih banyak menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan non makanan dibanding kebutuhan makanan, dengan perbandingan 56,73 persen untuk non makanan dan 43,27 persen untuk kebutuhan makanan. Sebaliknya pada 2017 penduduk Maluku Utara lebih sedikit mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan non makanan daripada makanan, dengan perbandingan 47,48 persen untuk memenuhi kebutuhan non makanan dan 52,52 persen untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Sementara itu, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 17,69 persen dibanding dengan tahun 2016, yaitu dari Rp 413.580,- menjadi Rp 486.734,- per kapita sebulan. Peningkatan ini terjadi di semua golongan pengeluaran. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran makanan per kapita di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan untuk golongan pengeluaran per kapita > Rp 500.000.

**Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016-2017**

Golongan Pengeluaran per Kapita	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<149 999	-	-	-	-	-	-
150 000 - 199 999	-	141.629	134.422	-	134.422	141.629
200 000 - 299 999	178.454	192.187	175.292	173.273	175.552	176.539
300 000 - 499 999	247.002	274.854	241.607	266.246	242.256	267.168
500 000 - 749 999	328.275	353.670	363.748	372.491	357.536	369.696
750 000 - 999 999	427.839	487.598	482.581	502.583	464.817	499.159
> 1 000 000	609.635	744.075	685.881	772.937	645.084	757.002
Rata-rata per Kapita	466.434	597.199	394.030	444.612	413.580	486.734

Sumber : Susenas 2017

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk non makanan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu dari Rp 542.188,- pada 2016 menjadi Rp 440.060,- pada 2017 atau terjadi penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran non makanan per kapita di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan untuk golongan pengeluaran per kapita > Rp 500.000.

**Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016-2017**

Golongan Pengeluaran per Kapita	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<149 999	-	-	-	-	-	-
150 000 - 199 999	-	12.228	61.489	-	61.489	12.228
200 000 - 299 999	93.988	79.938	75.357	100.904	83.770	97.284
300 000 - 499 999	168.114	153.144	157.319	157.274	180.300	156.832
500 000 - 749 999	278.956	264.110	262.820	248.364	322.041	250.703
750 000 - 999 999	438.982	374.873	375.248	355.786	589.128	360.148
> 1 000 000	994.196	1.034.694	701.798	709.009	1.845.971	888.825
Rata-rata per Kapita	619.048	725.689	313.212	331.144	542.188	440.060

Sumber : Susenas 2017

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

### Perkembangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria ini, penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan tersebut terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. memperoleh  $< 12$  persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- c. memperoleh  $> 17$  persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini (G). Nilai dari Indeks Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan yang ditetapkan Bank dunia, proporsi pengeluaran kelas penduduk 40 persen terendah selama dua tahun terakhir di atas 17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Maluku Utara tergolong rendah. Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah selama periode 2016-2017 menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dari 24,73 persen pada 2016 menjadi 21,35 persen pada 2017. Keadaan ini menggambarkan bahwa pada kelas 40 persen penduduk berpendapatan rendah cenderung tidak menentu seiring

dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Sebaliknya pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi justru terjadi peningkatan persentase yaitu dari 35,52 persen pada 2016 menjadi 41,11 persen pada 2017.

**Tabel 5.4 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2016-2017**

Proporsi Pengeluaran Penduduk	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
40 % Terendah	24,73	21,35
40 % Menengah	39,75	37,54
20 % Tertinggi	35,52	41,11
Indeks Gini	0,29	0,32

Sumber : Susenas 2017

Jika dilihat dari Indeks Gini, tampak bahwa distribusi pengeluaran penduduk mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 0,29 persen pada tahun 2016 menjadi 0,36 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2015-2016, tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran penduduk di Maluku Utara relatif rendah.

### Taraf Konsumsi Kalori dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

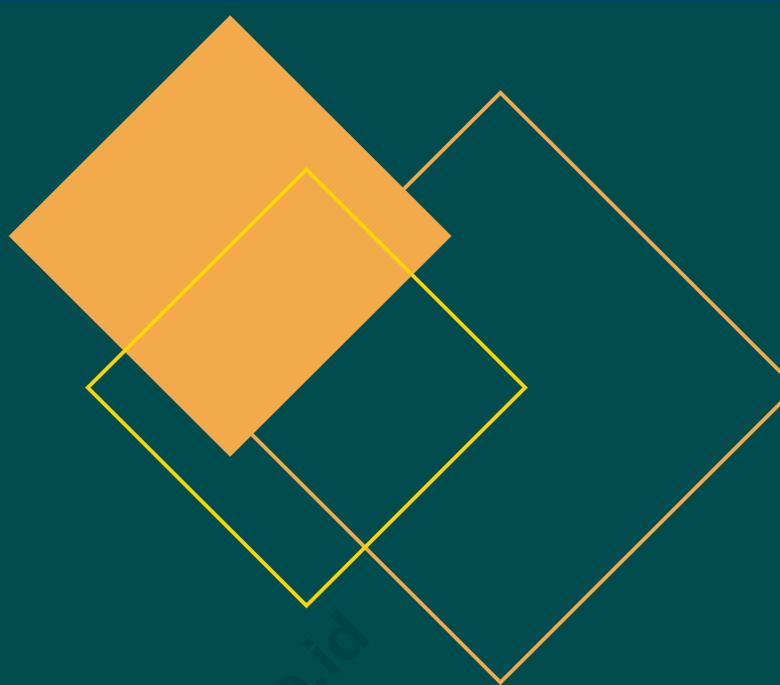
Pada tahun 2017 rata-rata konsumsi kalori penduduk Maluku Utara sebesar 1.782,27 kkal atau naik sebesar 62,86 kkal dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk Maluku Utara di tahun 2017 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Maluku Utara terus mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, yaitu dari 46,57 gram pada tahun 2016 menjadi 49,77 gram pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram.

**Tabel 5.5 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal 2016-2017**

Konsumsi per Kapita per Hari	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Energi (kkal)	1.703,72	1.820,82	1.726,59	1.768,96	1.720,41	1.783,27
Protein (gram)	49,14	53,67	45,62	48,29	46,57	49,77

Sumber : Susenas 2017

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk di perkotaan selama kurun waktu 2016-2017, yaitu 1.703,72 kkal pada tahun 2016 naik menjadi 1.820,82 kkal pada tahun 2017, sedangkan di daerah perdesaan pada tahun 2016 sebesar 1.726,59 kkal dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.768,96 kkal pada tahun 2017. Pada tahun 2017 rata-rata penduduk perkotaan mengkonsumsi protein sebanyak 53,67 gram sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengkonsumsi protein sebanyak 48,29 gram. Kecukupan konsumsi protein bagi penduduk perkotaan dan perdesaan masih berada di bawah standar kecukupan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa baik penduduk perkotaan maupun perdesaan masih belum memperhatikan akan kebutuhan asupan energi dan protein yang dibutuhkan bagi anggota keluarganya dan kesehatan tubuh.



<http://jalut.bps.go.id>

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN BEBAN DAN FINANSIAL



6

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## **Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah dikatakan layak sebagai bangunan tempat tinggal apabila rumah tersebut telah memiliki atap, lantai dan dinding. Di samping itu kualitas ketiga unsur tersebut juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Persentase rumah tangga menurut indikator kualitas perumahan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 6.1.

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat jelas kualitas perumahan di Maluku Utara, dimana pada 2017 terdapat 92,69 persen rumah tangga yang berlantai bukan tanah, 95,79 persen beratap layak (rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes), dan 98,26 persen berdinding permanen (rumah dengan dinding terluas tembok dan kayu). Jika dilihat menurut tipe daerah, tampak perbedaan yang cukup signifikan untuk kualitas rumah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan. Perumahan yang

berada di wilayah perdesaan masih banyak yang berlantainya tanah, yaitu sebesar 9,36 persen, sementara di perkotaan hanya 2,18 persen. Ditinjau dari atapnya, persentase rumah yang beratap layak di perdesaan relatif lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Pada 2017 sebanyak 99,43 persen rumah di daerah perkotaan telah beratap layak, sedangkan di daerah perdesaan baru mencapai 94,33 persen. Demikian pula kualitas rumah tinggal jika ditinjau dari jenis dinding terluas menunjukkan potret yang sama, yaitu rumah tangga dengan kualitas rumah berdinding permanen di daerah perkotaan sedikit lebih tinggi dibanding daerah perdesaan, yaitu 99,90 persen berbanding 97,60 persen.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2017**

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai Bukan Tanah	98,64	97,82	88,16	90,64	91,08	92,69
Atap Layak	99,13	99,43	91,97	94,33	93,96	95,79
Dinding Permanen	98,89	99,90	97,55	97,60	97,93	98,26

Sumber : Susenas 2017

Lebih rinci pengamatan per kabupaten/kota di Maluku Utara sepanjang tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang berlantai tanah di beberapa kabupaten/kota masih cukup tinggi bahkan ada yang diatas 10 persen yaitu Kabupaten Pulau Morotai (14,00 persen), Kabupaten Halmahera Barat (13,36 persen), dan Kabupaten Halmahera Utara (12,89 persen). Sebaliknya persentase rumah tangga yang berlantai tanah di Kabupaten Pulau Taliabu dan Ternate relatif kecil tidak sampai 2 persen. Bila ditinjau dari atapnya maka persentase rumah tangga yang beratap layak di Kabupaten Pulau Taliabu paling rendah yaitu sebesar 88,46 persen, sebaliknya di Ternate 100 persen rumah tangga telah memiliki atap yang layak. Bila dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki dinding permanen maka Kabupaten Halmahera Barat merupakan wilayah dengan persentase terkecil di Maluku Utara yaitu sebesar 95,21 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VI (1).

## Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya, diantaranya tersedianya air bersih serta jamban yang dimiliki sendiri. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk

keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus-menerus diusahakan pemerintah.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016-2017**

Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	77,58	78,61	15,41	23,92	32,72	39,50
Air Minum bersih 1)	86,90	86,64	50,68	53,44	60,76	62,91
Jamban sendiri	77,40	79,89	51,55	54,60	58,75	61,81
Jamban sendiri dengan tangki septik	70,40	78,49	40,40	48,35	51,40	56,94
Sumber penerangan listrik	99,70	99,40	86,25	92,17	89,99	94,23

Sumber : Susenas 2017

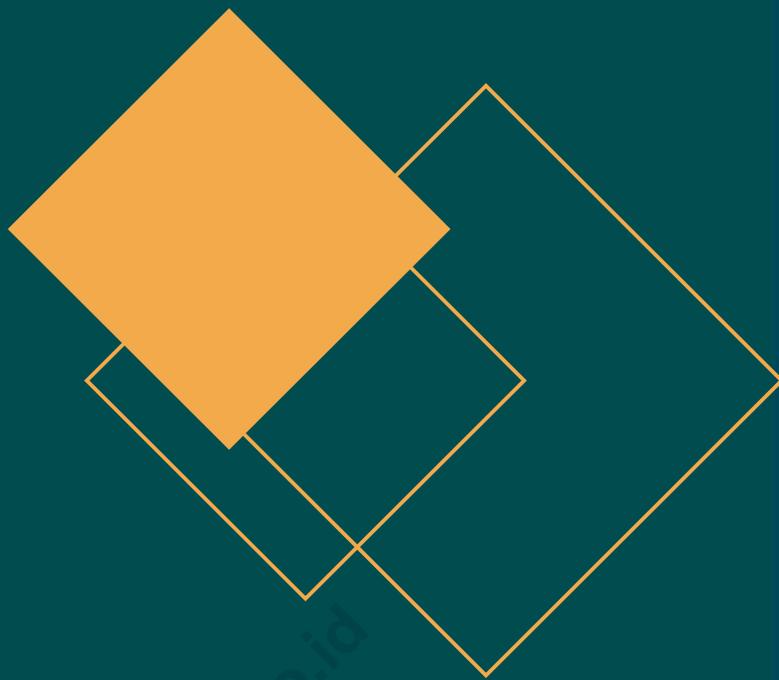
Pada 2017, rumah tangga di Maluku Utara yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum baru mencapai 39,50 persen. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibandingkan menurut tipe daerah. Pada 2017 di daerah perkotaan tercatat 78,61 persen rumah tangga yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air yang berasal dari ledeng, sementara di perdesaan hanya 23,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup penduduk perkotaan dalam hal mengkonsumsi air sangat jauh berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Sementara rumah tangga pengguna air minum bersih di Maluku Utara sebesar 62,91 persen. Mayoritas rumah tangga di perkotaan sudah mengkonsumsi air minum bersih (86,64 persen), sedangkan rumah tangga di perdesaan yang mengkonsumsi air minum bersih baru sebesar 53,44 persen.

Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa di Maluku Utara rumah tangga mempunyai fasilitas jamban sendiri pada 2017 mencapai 61,81 persen. Sama halnya dengan indikator-indikator perumahan lainnya, profil perumahan di Maluku Utara dilihat dari kepemilikan jamban sendiri oleh rumah tangga jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding rumah tangga yang tinggal di perdesaan yaitu 79,89 berbanding 54,60 persen.

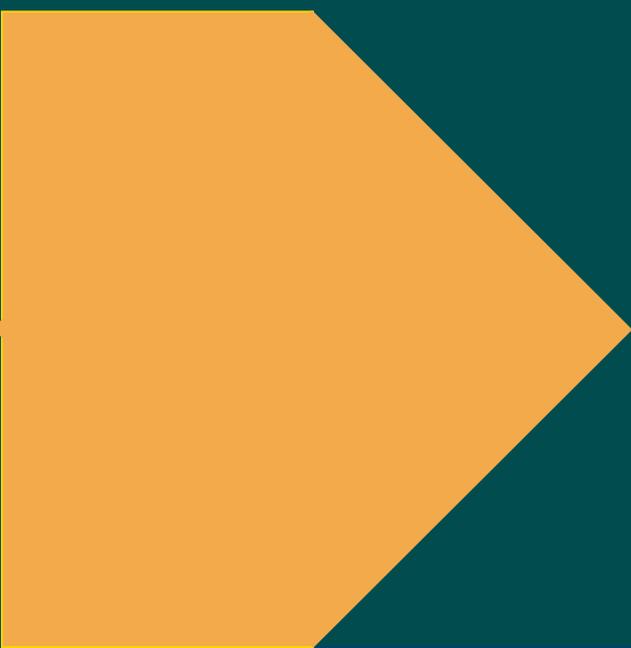
Di samping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada 2017 rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 56,94 persen. Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, maka di perkotaan memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 78,49 persen dibanding di daerah perdesaan yang baru mencapai 48,35 persen.

Fasilitas lainnya yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik yang dihasilkan lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Tabel 6.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 94,23 persen rumah tangga di Maluku Utara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Penggunaan listrik oleh rumah tangga di daerah perkotaan sebesar 99,40 persen, di daerah perdesaan tercatat 92,17 persen. Rendahnya penggunaan listrik di daerah perdesaan dirasa wajar karena sampai saat ini masih banyak wilayah perdesaan di Maluku Utara yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sedangkan untuk penggunaan listrik non PLN juga relatif sedikit karena harga dari bahan bakar listrik non PLN cukup mahal.



<https://malut.bps.go.id>

# KEMISKINAN



# 7

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan.

## Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah masalah nasional yang harus segera ditanggulangi. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Potret kemiskinan di Maluku Utara selama tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1 Perkembangan Kemiskinan, 2015-2017**

Indikator Kemiskinan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	79,90	74,68	76,47
Penduduk Miskin (Persen)	6,84	6,33	6,35
Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	0,70	0,73	0,81
Indeks Keparahan ( $P_2$ )	0,13	0,18	0,20
Garis Kemiskinan ( 000 Rp)	344,09	376,55	391,00

Sumber : Susenas 2017

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting, diantaranya Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ), dan Garis Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan ( $P_2$ ).

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara umum, garis kemiskinan di Maluku Utara pada 2017 mengalami kenaikan dibandingkan 2016 yaitu sebesar 3,84 persen atau naik dari Rp. 376,55 ribu pada 2016 menjadi Rp. 391,00 ribu pada 2017.

Pada 2015-2016, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 6,53 persen, yaitu dari 79,90 ribu jiwa menjadi 76,47 ribu jiwa. Bila dilihat persentase dari penduduk miskin selama 2015-2016, maka jumlahnya menurun dari 6,84 persen menjadi 6,33 persen. Sedangkan pada 2016-2017 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sekitar 2,40 persen dari 74,68 ribu jiwa menjadi 76,47 ribu jiwa di tahun 2017. Bila dilihat persentase dari penduduk miskin selama 2016-2017, maka jumlahnya meningkat dari 6,33 persen menjadi 6,35 persen

Persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2015–2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan ( $P_2$ ) terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) naik dari 0,70 pada 2015 menjadi 0,73 pada 2016, dan naik kembali menjadi 0,81 pada 2017. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahannya Kemiskinan ( $P_2$ ), dimana pada 2015 tercatat sebesar 0,13 naik menjadi 0,18 persen pada 2016 dan naik kembali menjadi 0,20 pada 2017. Kenaikan nilai kedua indeks tersebut di tahun 2017 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.



# SOSIAL LAINNYA



8

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>

Selain aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi dan perumahan, masih ada indikator sosial lainnya yang tidak termasuk dalam enam aspek tersebut yang juga mencerminkan kesejahteraan. Indikator tersebut diantaranya: persentase penduduk yang melakukan berpergian, persentase penduduk yang menguasai media teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon seluler dan komputer, persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, serta persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan.

## Berpergian

Berpergian menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berpergian (ke obyek wisata komersial, mengnap di akomodasi komersial). Tujuan melakukan berpergian biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Konsep berpergian yang digunakan BPS dalam Susenas adalah berpergian yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan jarak perjalanan pergi dan pulang (PP) sejauh minimal 100 km dan tidak dalam rangka sekolah atau mencari nafkah serta tidak dilakukan secara rutin. Berdasarkan konsep ini, Tabel 8.1 menyajikan persentase penduduk yang melakukan berpergian pada tahun 2017.

**Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Berpergian Menurut Tipe Daerah, 2017**

Daerah Tempat Tinggal	Apakah pernah berpergian ?	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	18,41	81,59
Perdesaan	15,20	84,80
Perkotaan + Perdesaan	16,09	83,91

Sumber : Susenas 2017

Pada 2017, penduduk yang melakukan berpergian sebanyak 16,09 persen. Apabila dilihat menurut tipe daerah, penduduk di perkotaan lebih banyak yang melakukan perjalanan dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan (18,41 persen berbanding 15,20 persen).

## Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana komunikasi tidak kalah pesat perkembangannya. Penggunaan telepon seluler sebagai sarana atau alat komunikasi pada saat ini lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan telepon biasa, meskipun harga telepon seluler maupun pulsanya lebih mahal. Telepon seluler banyak diminati karena lebih praktis dibawa ke mana saja sehingga memudahkan pengguna berkomunikasi di manapun berada dengan ditunjang oleh jangkauan jaringan yang semakin meluas.

**Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi, 2016-2017**

Alat Komunikasi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	69,63	80,96	38,74	54,57	42,19	61,88
PC/Komputer, Laptop/ Notebook, Tablet	27,45	28,41	5,53	7,99	11,45	13,65

Sumber : Susenas 2017

Perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat sekarang ini sangat terlihat jelas pada peningkatan kepemilikan alat komunikasi seperti telepon seluler dan komputer. Jika dilihat menurut tipe daerah, daerah perkotaan selalu mempunyai persentase lebih besar daripada perdesaan (Tabel 8.2). Perkembangan telepon seluler yang cukup pesat menyebabkan masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis dapat dibawa kemana-mana, lebih bersifat pribadi, tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler untuk mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Persentase rumah tangga yang memilih telepon seluler sebanyak 61,88 persen pada tahun 2017.

Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya yaitu akses internet. Media internet ini digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada 2017, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet sebesar 18,08 persen, dimana penduduk perkotaan yang memiliki akses internet jauh lebih besar dari penduduk perdesaan yaitu 40,61 persen berbanding 10,44 persen.

Berdasarkan Tabel 8.3 dapat dilihat bahwa dari penduduk yang pernah akses internet, mayoritas penduduk mengakses internet di rumah sendiri (84,67 persen) dan di tempat umum seperti warnet (33,52 persen). Sementara masih sangat sedikit penduduk yang mengakses internet di tempat lainnya yaitu 1,25 persen.

**Tabel 8.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Akses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Lokasi/Media, 2016-2017**

Lokasi/Media untuk Akses Internet	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah Sendiri	86,50	90,66	77,89	75,74	83,91	84,67
Bukan Rumah Sendiri	27,67	28,57	28,45	22,74	27,91	26,23
Tempat Bekerja/Kantor	37,45	31,8	26,71	24,43	34,22	28,84
Sekolah/Kampus	28,89	18,03	23,01	12,79	27,12	15,93
Tempat Umum	48,43	34,22	48,11	32,47	48,33	33,52
Di Dalam Kendaraan Bergerak	5,23	-	8,01	-	6,06	-
Kondisi Bergerak	-	11,87	-	13,67	-	12,59
Tempat Lainnya	-	0,54	-	2,32	-	1,25
Penduduk yang Akses Internet (%)	36,37	40,61	5,78	10,44	14,04	18,80

Sumber : Susenas 2017

## Pemberian Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial

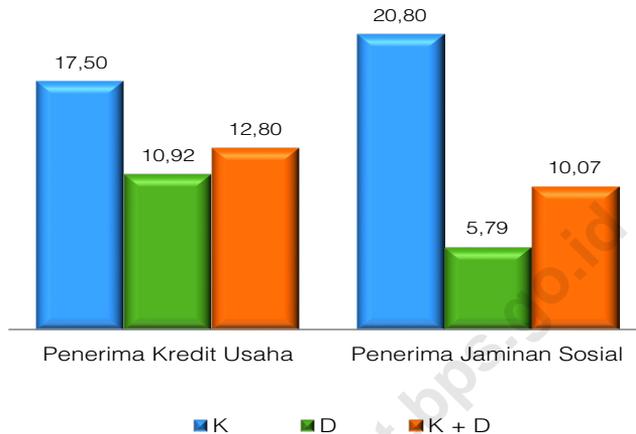
Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.1 memperlihatkan bahwa pada 2017, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha selama setahun terakhir adalah 12,80 persen. Jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga di perkotaan yang menerima kredit usaha pada 2017 sebanyak 17,50 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,92 persen.

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa secara umum terdapat 10,07 persen rumah tangga yang pernah menerima jaminan sosial selama 6 bulan terakhir. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, jaminan sosial lebih banyak

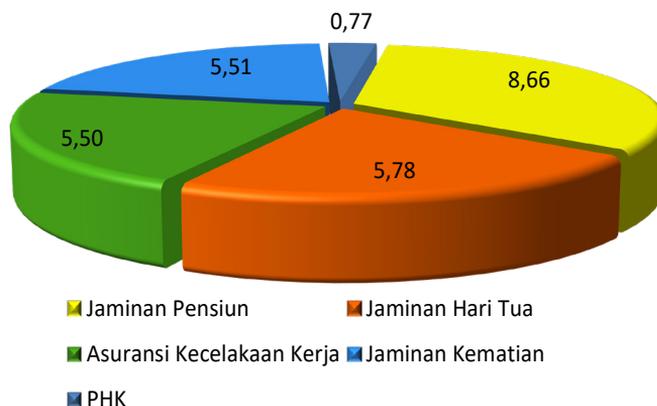
dimanfaatkan oleh rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan. Persentase rumah tangga di perkotaan dan perdesaan yang menerima jaminan sosial yaitu 20,80 persen berbanding 5,79 persen.

**Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha dan Penerima Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2017**



Rumah tangga yang menerima jaminan sosial pada 2017, paling banyak menggunakan jaminan pensiun/veteran (8,66 persen). Hal ini disebabkan kategori ini mencakup pelayanan kesehatan gratis yang didapat dari fasilitas BPJS Kesehatan bagi pegawai negeri sipil/pensiunan. Sementara itu pemanfaatan jaminan hari tua menunjukkan persentase sebesar 5,78 persen. Rumah tangga yang memanfaatkan jaminan/asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), masing-masing sebanyak 5,51 persen, 5,50 persen dan 0,77 persen.

**Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial, 2017**



## Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2017 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

**Tabel 8.4 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2016-2017**

Tahun	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	1,57	0,76	0,98
2017	1,48	1,12	1,22

Sumber : Susenas 2017

Selama tahun 2017 penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen menjadi 1,22 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai dari 0,98 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang terjadi di perdesaan sebesar 0,36 persen menjadi 1,12 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai dari 0,76 persen. Sebaliknya penduduk perkotaan yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan yang relatif tidak berarti sebesar 0,09 persen menjadi 1,48 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,75 persen. Selama tahun 2016 tingkat keamanan di wilayah perdesaan relatif lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan, dimana korban tindak kejahatan lebih banyak ditemui di daerah perkotaan.

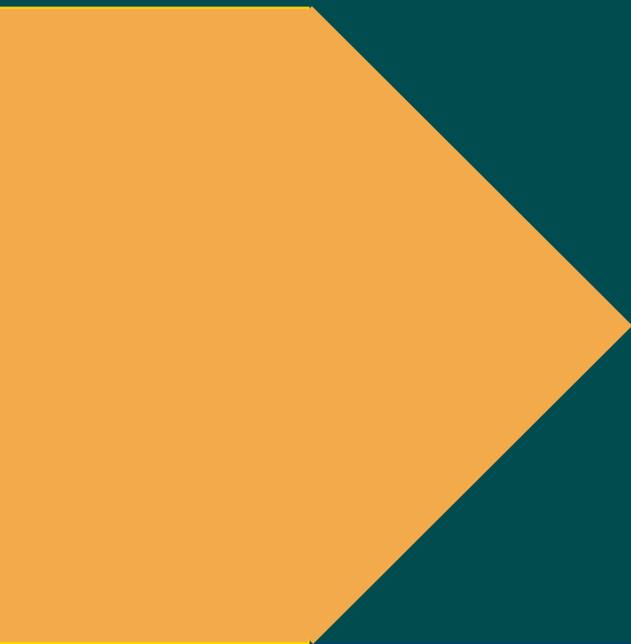
Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://malut.bps.go.id>



<https://malut.bps.go.id>

# LAMPIRAN



# L

## LAMPIRAN 1

Kabupaten/Kota	Penduduk Maluku Utara 2017		
	Lk	Pr	Lk + Pr
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	58 486	56 016	114 502
Halmahera Tengah	27 032	25 781	52 813
Kepulauan Sula	50 233	48 963	99 196
Halmahera Selatan	115 551	111 729	227 280
Halmahera Utara	95 634	91 470	187 104
Halmahera Timur	47 178	42 892	90 070
Pulau Morotai	32 879	31 122	64 001
Pulau Taliabu	26 489	25 439	51 928
Ternate	113 334	109 777	223 111
Tidore Kepulauan	50 042	49 295	99 337
<b>Maluku Utara</b>	<b>616 858</b>	<b>592 484</b>	<b>1 209 342</b>

## LAMPIRAN 2

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Tahun 2016-2017 (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	114 502	1,58	104
Halmahera Tengah	52 813	2,92	105
Kepulauan Sula	99 196	2,08	103
Halmahera Selatan	227 280	1,71	103
Halmahera Utara	187 104	1,91	105
Halmahera Timur	90 070	2,73	110
Pulau Morotai	64 001	2,55	106
Pulau Taliabu	51 928	1,19	104
Ternate	223 111	2,33	103
Tidore Kepulauan	99 337	1,15	102
Maluku Utara	1 209 342	1,98	104

## LAMPIRAN 3

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	1 704,20	114 502	67	9,47
Halmahera Tengah	2 653,76	52 813	20	4,37
Kepulauan Sula	3 304,32	99 196	30	8,20
Halmahera Selatan	8 148,90	227 280	28	18,79
Halmahera Utara	3 896,90	187 104	48	15,47
Halmahera Timur	6 571,37	90 070	14	7,45
Pulau Morotai	2 476,00	64 001	26	5,29
Pulau Taliabu	1 469,93	51 928	35	4,29
Ternate	111,39	223 111	2 003	18,45
Tidore Kepulauan	1 645,73	99 337	60	8,21
Maluku Utara	31 982,50	1 209 342	38	100,00

## LAMPIRAN 4

Kabupaten/Kota	Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2017			
	10-15	16-18	19-24	25+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	4,80	33,15	48,08	13,96
Halmahera Tengah	5,18	27,42	51,01	16,39
Kepulauan Sula	4,19	25,77	53,75	16,29
Halmahera Selatan	5,38	38,49	46,76	9,37
Halmahera Utara	4,68	31,04	51,40	12,88
Halmahera Timur	3,88	33,33	52,87	9,92
Pulau Morotai	5,36	32,66	49,72	12,26
Pulau Taliabu	11,08	27,60	47,41	13,91
Ternate	2,85	22,91	48,76	25,48
Tidore Kepulauan	2,91	17,30	59,89	19,90
Maluku Utara	4,56	29,49	50,48	15,47

## LAMPIRAN 5

Kabupaten/Kota	Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2017				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	88,50	86,89	88,88	64,02	75,66
Halmahera Tengah	81,45	72,95	81,19	54,21	70,29
Kepulauan Sula	87,47	70,64	78,18	50,01	73,49
Halmahera Selatan	83,86	79,38	83,12	47,73	79,56
Halmahera Utara	79,99	67,18	72,77	43,61	56,37
Halmahera Timur	85,46	82,37	81,88	52,23	80,51
Pulau Morotai	71,65	64,72	71,95	54,88	59,37
Pulau Taliabu	57,87	48,74	61,77	39,24	42,90
Ternate	90,10	85,02	88,32	55,69	83,25
Tidore Kepulauan	98,58	98,39	98,39	81,64	95,41
Maluku Utara	84,25	77,37	81,74	53,83	73,64

## LAMPIRAN 6

Kabupaten/Kota	Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2017		
	Dokter	Bidan	Lainnya
	(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	10,55	63,31	26,14
Halmahera Tengah	18,21	51,51	30,28
Kepulauan Sula	11,86	38,40	49,74
Halmahera Selatan	3,66	57,88	38,45
Halmahera Utara	6,51	63,73	29,76
Halmahera Timur	8,49	68,35	23,16
Pulau Morotai	9,85	74,66	15,49
Pulau Taliabu	7,99	33,78	58,23
Ternate	40,82	52,69	6,49
Tidore Kepulauan	25,73	62,48	11,79
Maluku Utara	14,65	56,47	28,88

\* Lainnya mencakup perawat, dukun beranak dan lainnya

## LAMPIRAN 7

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Sebulan Terakhir menurut kab/kota Dan Tempat/Cara Berobat, 2017					
	Rumah Sakit	Praktek Dokter/Klinik	Puskesmas	UKBM*	Bantra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	9,81	45,70	46,19	1,23	1,11	0,72
Halmahera Tengah	9,19	12,75	77,41	1,42	0,42	0,64
Kepulauan Sula	16,64	43,95	38,75	3,81	11,07	4,15
Halmahera Selatan	10,50	10,60	63,46	16,06	5,28	0,00
Halmahera Utara	24,75	33,55	41,87	2,25	0,00	2,84
Halmahera Timur	9,59	33,62	55,85	5,69	1,95	0,44
Pulau Morotai	10,67	10,77	47,26	34,57	0,49	0,00
Pulau Taliabu	3,78	17,22	69,37	6,73	0,48	2,90
Ternate	20,70	40,91	42,50	0,51	0,96	0,22
Tidore Kepulauan	15,02	23,29	57,81	6,20	1,63	0,00
Maluku Utara	15,04	29,01	51,49	7,15	2,25	0,87

\* UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) mencakup polindes, posyandu, toga dan lainnya

## LAMPIRAN 8

Kabupaten/ Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki															
	Tidak Memiliki Ijazah		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK/MAK		Diploma I dan Diploma II		Akademi/ Diploma III		Diploma IV/ S1/S2/S3	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Halmahera Barat	25,15	28,57	28,99	28,62	17,53	20,40	22,68	15,90	0,00	0,00	0,44	1,13	0,59	1,35	4,62	4,03
Halmahera Tengah	24,79	27,23	24,32	28,33	21,10	18,44	20,37	14,30	1,59	0,40	0,59	1,64	1,11	1,36	6,14	8,31
Kepulauan Sula	19,50	18,95	28,69	34,31	20,36	19,99	26,09	18,23	0,75	0,63	0,78	0,93	0,89	1,71	2,94	5,25
Halmahera Selatan	26,25	32,90	29,10	33,03	19,97	16,45	20,21	10,11	0,28	0,25	0,54	1,52	0,31	1,17	3,34	4,57
Halmahera Utara	23,94	27,13	26,56	28,76	18,82	17,80	24,69	19,23	0,30	0,34	0,23	1,09	0,80	1,05	4,66	4,60
Halmahera Timur	24,14	29,56	23,24	30,55	21,20	16,19	23,87	14,82	0,00	0,56	0,24	0,97	1,27	1,78	6,04	5,57
Pulau Morotai	32,77	39,85	29,22	27,75	13,00	15,72	19,32	12,53	0,54	0,47	0,19	0,35	0,42	1,38	4,56	1,95
Pulau Taliabu	25,25	28,66	33,02	35,12	18,42	17,32	19,00	13,35	0,18	0,17	0,19	0,18	0,19	0,86	3,74	4,33
Ternate	12,88	16,39	15,20	14,56	12,64	15,44	44,75	36,16	0,00	0,15	0,44	0,63	0,55	2,40	13,53	14,26
Tidore Kepulauan	13,76	17,70	26,44	27,25	18,40	19,55	27,50	18,97	1,16	1,87	0,56	2,25	0,54	2,64	11,65	9,78
Maluku Utara	21,78	25,62	25,34	27,46	17,79	17,47	27,02	19,31	0,36	0,43	0,43	1,11	0,63	1,63	6,66	6,97

## LAMPIRAN 9

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	98,68	98,42	97,84
Halmahera Tengah	98,53	98,58	98,00
Kepulauan Sula	98,74	97,96	98,77
Halmahera Selatan	98,05	98,65	98,49
Halmahera Utara	98,08	99,23	99,04
Halmahera Timur	98,03	96,60	97,76
Pulau Morotai	97,39	97,29	97,44
Pulau Taliabu	97,87	97,59	98,84
Ternate	99,64	99,72	99,69
Tidore Kepulauan	98,25	99,47	98,73
Maluku Utara	98,49	98,67	98,68

## LAMPIRAN 10

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2015	2016*	2017	2015	2016*	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	71,92		68,50	4,29		2,19
Halmahera Tengah	68,13		61,06	10,36		3,95
Kepulauan Sula	72,15		60,72	3,75		5,86
Halmahera Selatan	69,35		67,53	6,31		4,68
Halmahera Utara	63,62		59,04	5,81		4,92
Halmahera Timur	72,06		71,36	4,03		4,36
Pulau Morotai	56,39		63,50	9,97		6,11
Pulau Taliabu	66,93		70,82	9,72		6,69
Ternate	61,17		60,03	6,87		7,71
Tidore Kepulauan	66,23		60,89	4,58		5,95
Maluku Utara	66,43	66,19	63,65	6,05	4,01	5,33

\* Sampel Sakernas tahun 2016 hanya digunakan untuk estimasi tingkat Provinsi

## LAMPIRAN 11

Kabupaten/Kota	<i>Gini Ratio</i>		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,234	0,258	0,238
Halmahera Tengah	0,322	0,265	0,291
Kepulauan Sula	0,298	0,262	0,257
Halmahera Selatan	0,244	0,209	0,265
Halmahera Utara	0,291	0,257	0,235
Halmahera Timur	0,264	0,266	0,318
Pulau Morotai	0,269	0,241	0,288
Pulau Taliabu	0,233	0,273	0,243
Ternate	0,245	0,270	0,281
Tidore Kepulauan	0,205	0,227	0,227
Maluku Utara	0,280	0,286	0,317

## LAMPIRAN 12

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2017		
	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	86,64	94,05	95,21
Halmahera Tengah	95,12	96,40	100,00
Kepulauan Sula	93,29	92,88	100,00
Halmahera Selatan	91,60	92,58	98,42
Halmahera Utara	87,11	97,64	97,43
Halmahera Timur	92,24	97,39	99,48
Pulau Morotai	86,00	90,68	95,81
Pulau Taliabu	98,61	88,46	97,01
Ternate	98,51	99,78	100,00
Tidore Kepulauan	97,31	97,77	97,20
Maluku Utara	92,69	95,64	98,26

## DARTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2018). *Maluku Utara dalam Angka 2018*. Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2017*. Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2018). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara Agustus 2017*. Ternate.

<https://malut.bps.go.id>

## ISTILAH TEKNIS

### **Air Minum Bersih**

Air yang bersumber dari leding, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank)  $\geq$  10 meter.

### **Angka Beban Tanggungan**

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 5 tahun dan 66 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

### **Angka Harapan Hidup**

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

### **Angka Kematian Bayi**

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

### **Angka Kesakitan**

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

### **Angka Melek Huruf**

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

### **Angka Partisipasi Murni**

Proporsi anak usia sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

### **Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

### **Bekerja**

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, minimal selama satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap

sebagai pekerja. bekerja dianggap sebagai pekerja.

### **Indeks Gini**

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

### **Jumlah Jam Kerja Seluruhnya**

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

### **Kepadatan Penduduk**

Rata-rata banyaknya penduduk per km<sup>2</sup>.

### **Lapangan Usaha**

**Bidangkegiatan dari pekerjaan/tempat bekerjadimana seseorang bekerja.**

### **Masih Bersekolah**

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

### **Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

### **Pengangguran**

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

### **Pengangguran Terbuka**

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

### **Pengeluaran**

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman, tembakau dan siri, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya dan kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

### **Pekerja tidak dibayar**

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga rumah tangga atau bahkan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

**Berpergian**

Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin.

**Rata-rata lama Sekolah**

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Status Pekerjaan**

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

**Tamat Sekolah**

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapat tanda tamat ijazah.

**Tidak/Belum Pernah Sekolah**

Tidak atau belum pernah bersekolah disekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan sekolah.

**Tidak Bersekolah Lagi**

Yaitu pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

**Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

# SUMBER DATA

## SENSUS PENDUDUK

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan enam kali sensus penduduk yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang ada di wilayah geografis Indonesia (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tunawisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar lima persen rumah tangga.

## SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dilaksanakan setiap tahun dengan pergantian modul setiap tiga tahunan. Data pokok yang dicakup antara lain: data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

1. Konsumsi/Pengeluaran
2. Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
3. Sosial Budaya dan Pendidikan.

## SUMBER DATA LAINNYA

Selain dari sensus dan survei, Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Maluku Utara 2017 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi pemerintah di luar BPS yang terangkum dalam Maluku Utara dalam Angka sebagai sumber data sekunder.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65 Ternate, Telp. (0921) 3127878 Fax. (0921) 3126301

Homepage : <http://malut.bps.go.id> Email : [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)